

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Terancam Sanksi, DKI Kebut Pembahasan Anggaran 2020

Rapat pembahasan RAPBD 2020 akan dimulai secara maraton setelah alat kelengkapan DPRD terbentuk pada awal pekan ini.

Francisco Rosarians
francisco@tempo.co.id

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah DKI Jakarta akan mempercepat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020. Ketua DPRD Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, mengatakan pembahasan RAPBD 2020 akan dikebut setelah seluruh alat kelengkapan Dewan terbentuk pada awal pekan ini.

“Senin (hari ini) akan diumumkan dalam rapat paripurna. Jadi, alat kelengkapan (Dewan) sudah terbentuk dan pembahasan (RAPBD) bisa cepat dan tuntas,” kata Prasetyo, akhir pekan lalu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2020, DPRD dan pemerintah Jakarta harus merampungkan pembahasan anggaran paling lambat 30 November 2019. Jika pengesahan APBD 2020 melewati tenggat itu, DKI Jakarta terancam sejumlah sanksi.

Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain, adalah pemotongan anggaran dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU) dari pemerintah pusat. Selain itu, menurut Pasal 321 ayat 2 undang-undang tersebut, kepala daerah dan anggota DPRD terancam tak menerima hak keuangan mereka selama enam bulan.

Normalnya, pembahasan RAPBD 2010 dimulai sejak Agustus lalu hingga akhir November mendatang. Tapi pembahasan RAPBD 2020 terhenti karena pergantian anggota DPRD periode 2014-2019 oleh anggota DPRD periode 2019-2024.

DPRD periode 2014-2019 sempat membahas secara singkat Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020. Seusai pelantikan, DPRD baru tak langsung melanjutkan pembahasan KUA PPAS 2020. Sebab, DPRD baru masih berkuat pada pemilihan pimpinan dan pengisian alat kelengkapan Dewan yang berbelit.

“Senin (hari ini) akan diumumkan dalam rapat paripurna. Jadi, alat kelengkapan (Dewan) sudah terbentuk dan pembahasan (RAPBD) bisa cepat dan tuntas.”

Prasetyo Edi Marsudi
Ketua DPRD Jakarta

Menurut Prasetyo, pembagian pimpinan di level komisi dan badan Dewan telah selesai. Komisi A akan dipimpin Fraksi Partai Demokrat, Komisi B dipimpin Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Komisi C dipimpin Fraksi Partai Amanat Nasional, Komisi D dipimpin Fraksi Partai Gerindra, dan Komisi E dipimpin Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selanjutnya, setiap fraksi tinggal memilih dan mengirimkan nama anggotanya untuk menjadi anggota setiap komisi. “Semua sudah sepakat. Ini untuk kepentingan rakyat,” kata dia.

Senada dengan Prasetyo, Wakil Ketua DPRD Jakarta, Muhammad Taufik, mengatakan pembahasan APBD akan dilakukan secara maraton selama satu bulan penuh. DPRD dan pemerintah Jakarta akan menggelar rapat pembahasan yang serius dan efisien. “Pasti kelar (sebelum 30 November 2019),” kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan seluruh jajarannya siap melakukan *sprint* alias lari cepat dalam

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Terancam Sanksi, DKI Kebut Pembahasan Anggaran 2020

pembahasan RAPBD 2020. Anies pun meminta DPRD melakukan hal yang sama untuk mencapai target pengesahan sebelum akhir November mendatang. Apalagi, kata dia, sejumlah *item* dalam KUA-PPAS 2020 mengalami penyesuaian dengan prediksi kondisi ekonomi tahun depan. "Selama ini pembahasannya mulai Agustus (hingga November). Ini sudah Oktober," ujar Anies.

Isu pembahasan RAPBD 2020 sempat memperuncing hubungan antara pemerintah Jakarta dan DPRD baru. Musababnya, sejumlah anggota DPRD yang baru dilantik mengaku kesulitan mendapatkan dokumen asli KUA-PPAS 2020. Mereka pun mempersoalkan pemerintah DKI

yang belum mengunggah dokumen lengkap KUA-PPAS dalam situs web resmi www.apbddki.go.id.

"Sekarang mereka (pemerintah DKI) sudah memberikan (KUA-PPAS 2020)," kata Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Ahmad Idris, yang sebelumnya mempersoalkan belum diumumkannya dokumen anggaran Jakarta.

Idris menambahkan, Fraksi PSI akan membahas secara detail seluruh mata anggaran dalam RAPBD 2020. Meski demikian, dia mengaku belum mengetahui kapan pembahasan KUA-PPAS 2020 dengan eksekutif akan dimulai. "Belum tahu. Senin rapat paripurna dulu."

● TAUFIQ SIDDIQ

Perbandingan APBD 2019 dan RAPBD 2020

VOLUME Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta pada 2020 diperkirakan naik 7,75 persen dibanding APBD 2019, yakni dari Rp 89,088 triliun menjadi Rp 95,995 triliun. APBD 2020 juga diasumsikan surplus Rp 3,020 triliun. Sedangkan APBD 2019 defisit Rp 6,125 triliun. Berikut ini perbandingan APBD 2019 dan RAPBD 2020.

Uraian	APBD 2019 (triliun)	RAPBD 2020 (triliun)	Naik (Turun) %
I. PENDAPATAN	74,776	87,224	16,65
A. Pendapatan asli daerah	50,624	57,716	14,01
B. Dana perimbangan	21,309	25,818	21,16
C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	2,843	3,689	29,76
II. BELANJA	80,902	84,203	4,08
A. Belanja tidak langsung	34,509	37,355	8,25
B. Belanja langsung	46,392	46,848	0,98
Surplus/(Defisit)	6,125	3,020	—
III. PEMBIAYAAN			
A. Penerimaan	14,311	8,770	(38,71)
B. Pengeluaran	8,186	11,791	44,04
TOTAL APBD	89,088	95,995	7,75

Asumsi yang Mendasari Penyusunan Anggaran

	2019	2020
Pertumbuhan ekonomi (%)	6,2	6,3
Inflasi (%)	3,2 plus/minus 1	3,2 plus/minus 1
Nilai tukar (Rp/US\$)	15.000	14.000

SUMBER: RANCANGAN KUA-PPAS 2020 DKI JAKARTA